

RENCANA STRATEGIS



**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA
TENGARA TAHUN 2020-2024**



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA
TENGGARA

NOMOR : SK. 57 /BPPHLHK/TU/02/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA
BALI NUSA TENGGARA NO. SK. 192/BPPHLHK/TU/11/2019 TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dilakukan penyusunan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disahkannya Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2024;

4. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA NO. SK. 192/BPPHLHK/TU/11/2019 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2020 – 2024

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Strategis lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara No. SK.192/BPPHLHK/TU/11/2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Balai,



Taqiuddin, S.Hut., M. P

NIP. 19740628 199903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Jakarta.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
PENGANTAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024	9
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	9
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I	10
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	13
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Unit Kerja Eselon II dan UPT	13
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing – masing Output Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT	15
3.3. Pengarusutamaan	23
3.4. Strategi Kelembagaan	23
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
4.1. Peta Sebaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT	26
4.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	33
BAB V. PENUTUP	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran Sarana Prasarana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
Tabel 2.	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen PHLHK
Tabel 3.	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Tabel 4.	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Tabel 5.	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Tabel 6.	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana
Tabel 7.	Indikator Kinerja Kegiatan, Sub-Output, Komponen Sekretariat Ditjen PHLHK
Tabel 8.	Indikator Kinerja Kegiatan, Sub-Output, Komponen Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Tabel 9.	Indikator Kinerja Kegiatan, Sub-Output, Komponen Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Tabel 10.	Indikator Kinerja Kegiatan, Sub-Output, Komponen Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Tabel 11.	Indikator Kinerja Kegiatan, Sub-Output, Komponen Direktorat Penegakan Hukum Pidana
Tabel 12.	Target Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
Tabel 13.	Kerangka Pendanaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
Tabel 14.	Matrik Kinerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 2. Sebaran SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 3. Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 5. Realisasi Kegiatan Pengaduan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 6. Realisasi Kegiatan Pengawasan Izin Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 7. Realisasi Kegiatan Operasi (Luas Kawasan yang diamankan) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 8. Realisasi Kegiatan Penyelesaian Kasus P.21 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
- Gambar 9. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Eselon 1
- Gambar 10. Logic Model Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
- Gambar 11. Logic Model Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan
- Gambar 12. Logic Model Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gambar 13. Logic Model Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK

PENGANTAR

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk dapat menegakkan hukum yang tegas dan konsisten khususnya di Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, maka diperlukan perencanaan yang matang agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat fokus dan tepat sasaran.

Perencanaan yang matang diperlukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat fokus dan tepat sasaran, sehingga dapat menegakkan hukum yang tegas dan konsisten khususnya di Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dirancang dalam kurun waktu 5 tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi UPT BPPHLHK.

Dasar tata cara penyusunan Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Renstra merupakan dasar bagi penetapan rencana-rencana tahunan, termasuk untuk perencanaan anggaran tahunan, serta untuk pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan (LAKIP). Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara disusun agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat terencana dengan baik, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara juga didasarkan

pada Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

Semoga Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan arahan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian IKU dan IKK dari Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dalam perjalanan waktu selalu terbuka untuk direvisi/ diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan yang dapat dijadikan pedoman dan arahan yang jelas untuk lima tahun kedepan.

Sidoarjo, Februari 2022

Kepala Balai,



Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

A. TUGAS, FUNGSI DAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

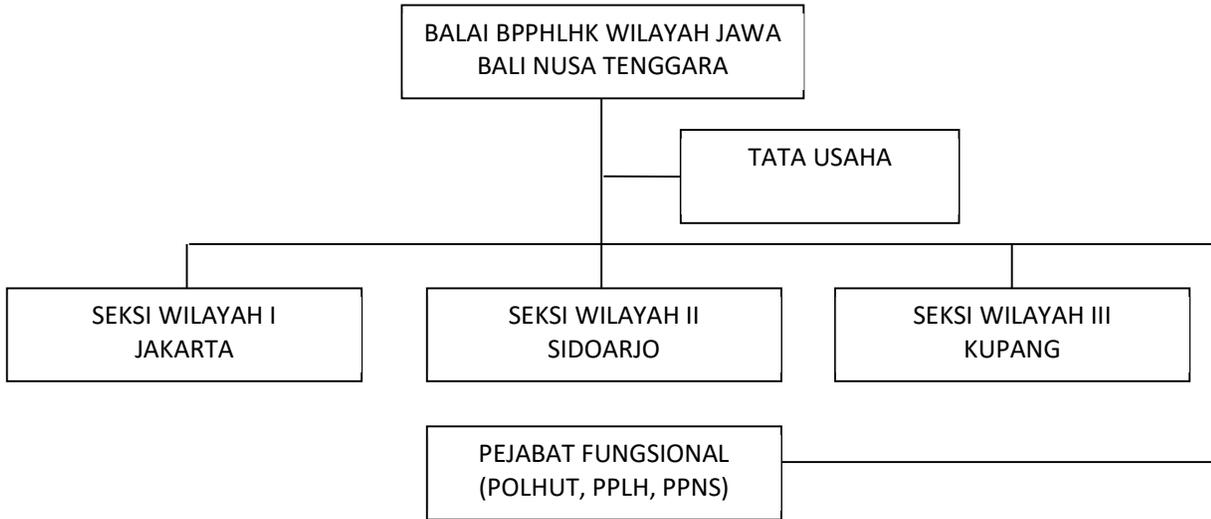
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

- Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
- Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan.
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
- Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

B. STRUKTUR ORGANISASI

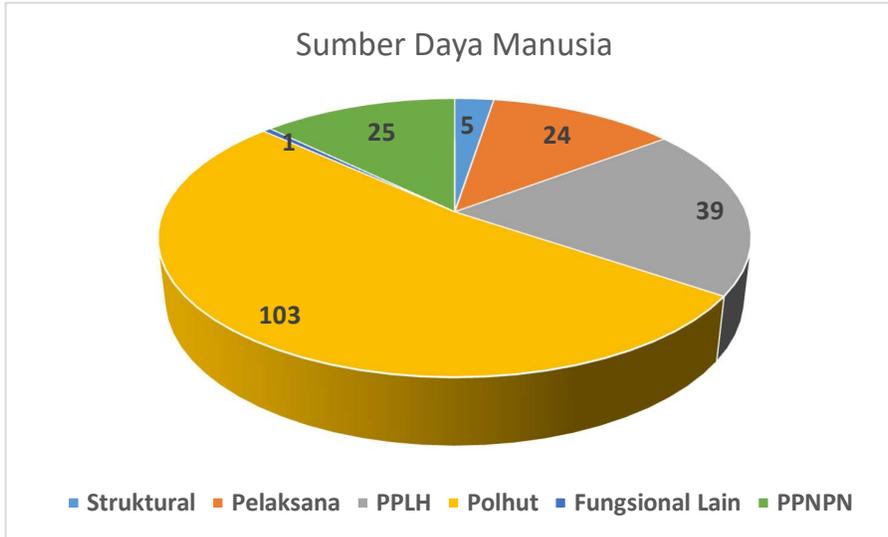
Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

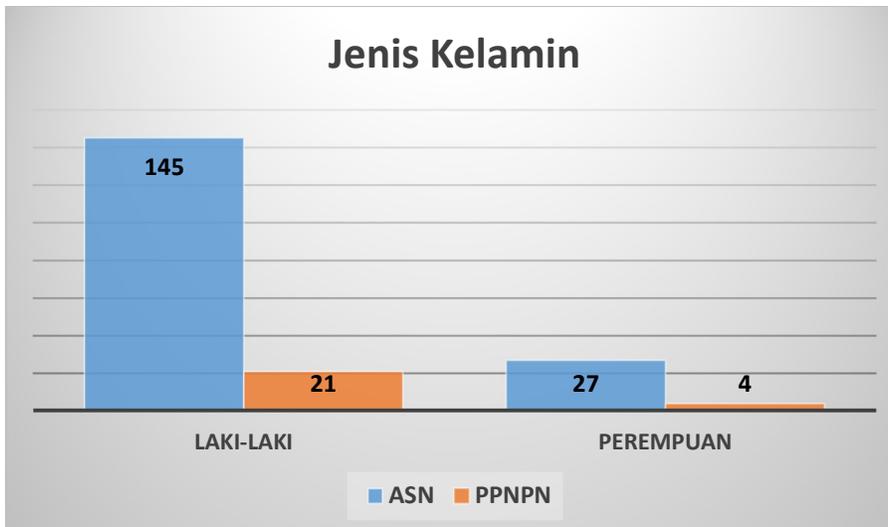
C. SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun kondisi sebaran pegawai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara terdiri dari 5 Struktural, 24 pelaksana, 39 PPLH, 103 Polhut, 1 Fungsional Lainnya dan 25 PPNN yang ditampilkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Sebaran SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Dari 197 Sumber Daya Manusia tersebut apabila dibagi per jenis kelamin dan per status ASN ataupun PPNN dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 3. Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

D. SARANA DAN PRASARANA

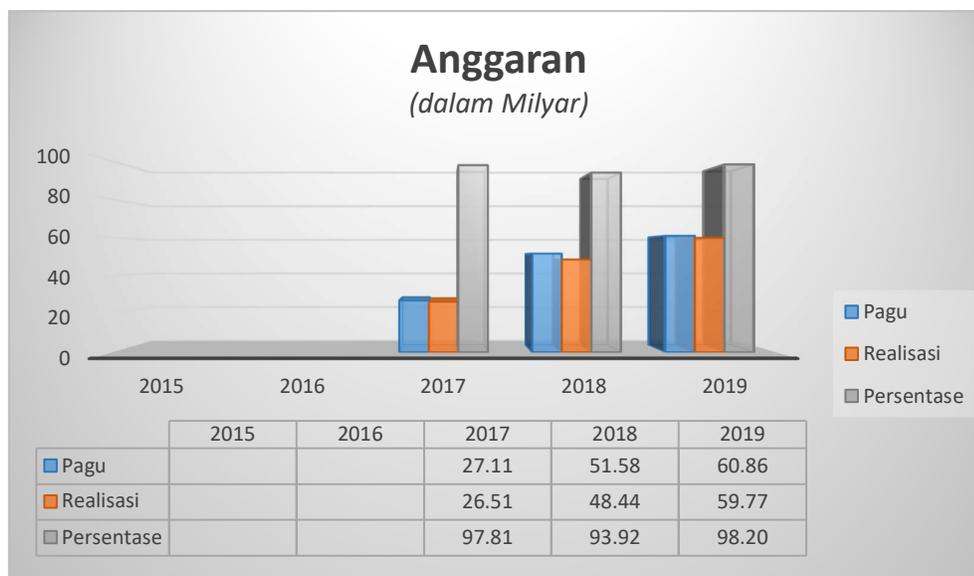
Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara antara lain:

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mobil Struktural	-	1	-	-	-
2	Mobil Operasional/Lapangan	-	-	24	-	-
3	Mobil Operasional Kantor	-	2	-	4	2
4	Mobil Tahanan	-	-	-	-	1
5	Mobil PPLH	-	-	-	-	-
6	Sepeda Motor Patroli	-	-	-	17	-
7	Sepeda Motor Operasional	-	2	6	3	1
8	Senjata Api	-	-	-	20	11
9	Gedung Kantor	-	1	-	1	1

Tabel 1. Sebaran Sarana Prasarana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

E. CAPAIAN KINERJA

Berikut hasil Capaian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara periode 2015-2019. Dalam kegiatan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan semua kegiatan termasuk dalam prioritas nasional.



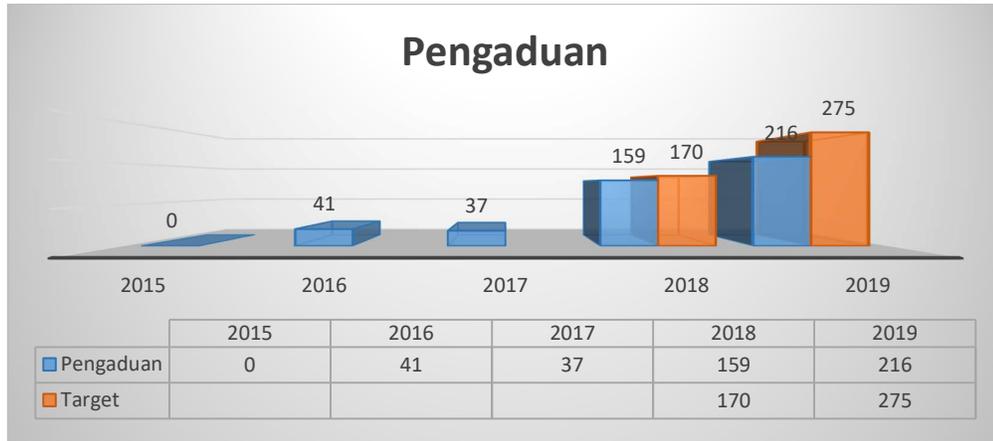
Gambar 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Capaian kinerja kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dari tahun 2016 – 2019 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Target				Capaian			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Pengaduan (PN)	0	0	170	275	41	37	159	216
2	Pengawasan Ijin (PN)	0	0	110	100	24	139	131	151
3	Operasi (PN)	0	0	800	500	0	130,21	910,51	725,38
4	P21 (PN)	0	0	15	17	5	20	22	25

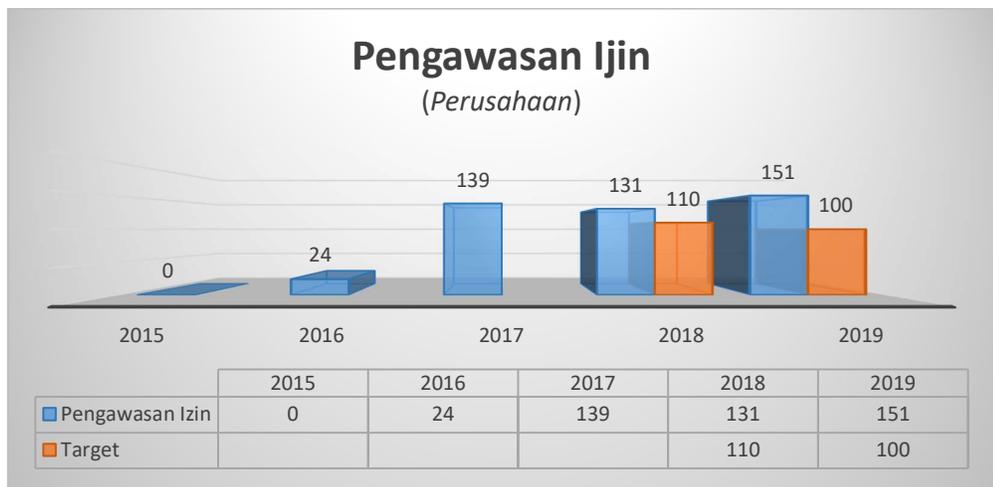
Tabel 2. Capaian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2016 - 2019

Jumlah keseluruhan kegiatan pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 453 dari target 445 Pengaduan dengan besaran capaian sebesar 101,8%.



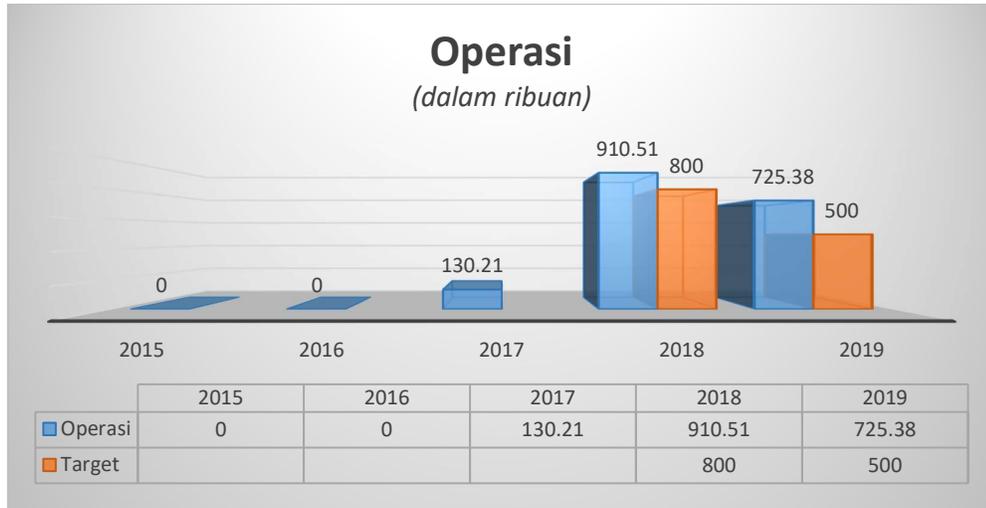
Gambar 5. Realisasi Kegiatan Pengaduan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Jumlah keseluruhan kegiatan Pengawasan Izin yang telah diawasi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 445 Perusahaan dari target 210 Perusahaan dengan besaran capaian sebesar 211,9%.



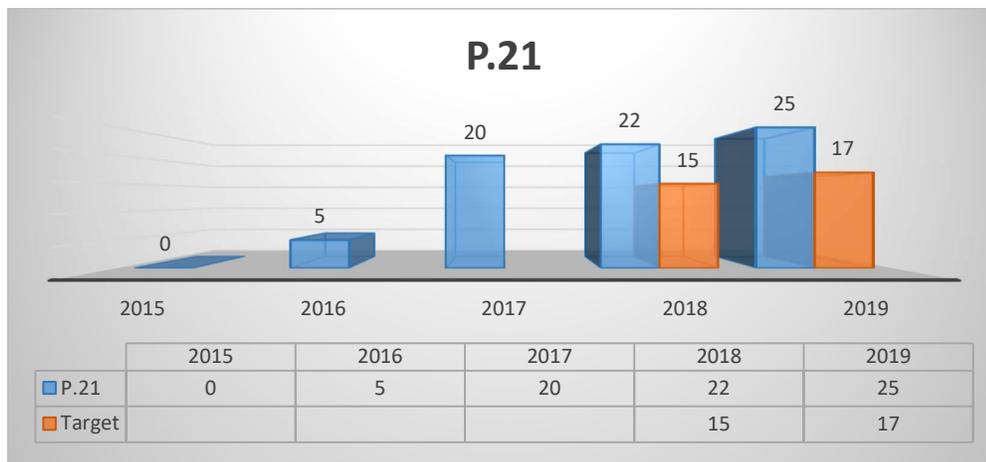
Gambar 6. Realisasi Kegiatan Pengawasan Izin Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Jumlah keseluruhan luas Kawasan yang diamankan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dari tahun 2015 – 2019 seluas 1.766.101,42 Ha dari target 1.300.000 Ha dengan besaran capaian sebesar 135,85%.



Gambar 7. Realisasi Kegiatan Operasi (Luas Kawasan yang diamankan) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Jumlah keseluruhan berkas Kasus P.21 dari kegiatan penyidikan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 72 P.21 dari target 32 P.21 dengan besaran capaian sebesar 225%.



Gambar 8. Realisasi Kegiatan Penyelesaian Kasus P.21 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum memiliki banyak faktor-faktor yang dapat menjadi potensi dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

- Belum adanya pemetaan kompetensi SDM yang berfungsi untuk penempatan/penugasan, kebutuhan training dan peningkatan kompetensi, serta penambahan atau rekrutmen SDM
- Belum adanya pelatihan SDM
- Belum adanya alokasi anggaran dan mekanisme pelaporan untuk pelatihan secara terencana dalam 5 tahun ke depan sehingga pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan belum optimal
- Petugas SIMAK dan SAIBA masih merangkap jabatan, sehingga ada kendala rekonsiliasi dan konsolidasi, serta belum optimalnya penguasaan materi
- Sumber Daya Manusia untuk penerapan aplikasi pengelolaan anggaran baru (SAKTI) masih perlu ditingkatkan
- Sumber Daya Manusia yang tersedia masih kurang mencukupi untuk menangani sistem aplikasi yang ada (opsroom, sikadir, dll)
- Tidak semua Undang-undang yang dimandatkan kepada Ditjen Gakkum dikuasai oleh PPNS lingkup Balai PHLHK Wilayah Jabalnusra (UU Sampah dan KTA)

2. Sarana dan Prasarana

- Adanya kebutuhan penambahan ruang kerja
- Belum terlaksananya pengelolaan eco office
- Adanya kendala dalam ketertiban sistem pengelolaan BMN
- Belum adanya standar pemenuhan kebutuhan sarpras di setiap unit kerja
- Perlu diusulkan pengadaan tanah dan bangunan

- Perlu adanya pemenuhan sarana dan prasarana pengamanan maupun pengawasan untuk setiap Pos Gakkum.
- 3. Kelembagaan
 - Pengangkatan PPLH agar dapat dilakukan di unit kerja terkait pengawasan izin lingkungan
- 4. Regulasi dan Kerjasama
 - Perlunya pembangunan pola kerja kolaboratif seluruh bagian untuk memudahkan penyelesaian tugas
 - Masih adanya beban terkait penanganan gugatan hukum yang belum dapat ditangani secara mandiri
 - Adanya kesenjangan koordinasi di tingkat pejabat eselon
- 5. Peraturan
 - Belum tersosialisasikannya SOP yang telah disusun
 - Belum adanya pemahaman prosedur pengadaan tanah dan bangunan kantor
 - Perlu dilakukannya penataan asset BMN berupa penelusuran secara digital (barcoding)
- 6. Karakteristik
 - Belum terlaksananya Revisi Anggaran Dilakukan Tiga Kali dalam Setahun demi mencegah kurang terkontrolnya usulan revisi anggaran
 - Aplikasi SAKTI masih tahap uji coba sehingga menyebabkan terhambatnya revisi anggaran

B. ANALISIS SWOT

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK analisis SWOT merupakan teknik dalam membedah kasus sebagai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan/peluang (Opportunity) dan ancaman (threat). Tendensi (trend) atau kejadian dengan mengancam perkembangan atau keberlangsungannya organisasi.

Analisis SWOT digunakan untuk mencari keuntungan dan memperbaiki situasi. Mencari keuntungan dilakukan dengan ekspansi, memperbaiki situasi dengan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

1. Strength

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat pelaksana
- Struktur organisasi telah mencapai tingkat tapak di lapangan dengan tersedianya 7 Pos Gakkum.

2. Weakness

- Pelatihan/training SDM belum terpantau di dalam database
- Peraturan perundangan-undangan pada tingkat standar operasional prosedur belum lengkap dan/atau perlu dimutakhirkan
- Ketersediaan SDM masih yang masih kurang mencukupi, diantaranya kekurangan Polhut, PPLH, Operator sistem opsroom, dll.
- Kondisi sarpras yang masih belum lengkap untuk mendukung operasional kegiatan.

3. Opportunity

- Setdijen PHLHK memiliki peranan yang krusial dalam pencapaian sasaran pokok RPJPN 2005-2025 dan 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024.
- Diamanatkan secara eksplisit dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan bidang LHK
- Termutakhirkannya peraturan terkait koordinasi antara Ditjen Pembinaan dan Pengembangan Daerah oleh Kemendagri
- Meningkatkan keterlibatan stakeholders maupun pemangku Kawasan dalam pelaksanaan pengamanan Kawasan serta aparaturnya lainnya

4. Threat

- Masih banyak regulasi harus ditetapkan
- Kapasitas penegakan hukum di kabupaten/kota masih pada nilai indeks terendah

- Kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektivitas penegakan hukum
- Jumlah dan kompleksitas kasus LHK cenderung meningkat

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KLHK

2.1.1 Visi

Sesuai dengan arahan Presiden pada saat sidang cabinet parpurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstar K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor : B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

- a. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- b. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2 Misi

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi KLHK yaitu:

- a. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- b. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3 Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;

- d. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.1.4 Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi

Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

2.2. VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT KERJA ESELON I

Melanjutkan visi dan misi Kementerian LHK demi tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Ditjen Gakkum LHK telah menentukan visi dan misi unit kerjanya untuk periode 2020-2024.

Visi Ditjen Gakkum LHK untuk lima tahun mendatang adalah:

“Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan Lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.”

Dengan kata kunci: berkualitas dan berkeadilan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menentukan 4 (empat) misi organisasi sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, professional, responsif dan inovatif serta berkesetaraan gender;
- b. Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasiskan sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;
- c. Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrumen, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;
- d. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat dan terpercaya.

Disamping itu, sebagai organisasi penegak hukum yang bernaung di bawah Kementerian LHK, Ditjen Gakkum juga memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi. Tujuan tersebut ialah:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, inovasi dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta keamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Berdasarkan hal itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah sasaran strategis ke-empat, yaitu "Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing". Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Ditjen Gakkum LHK adalah IKU 14 yakni "Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum" dan IKU 18 yaitu "Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK" yang berlaku kepada semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Ditjen Gakkum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya.

Sasaran Strategis Ditjen Gakkum LHK adalah sebagai berikut:

- a. Teramankannya lingkungan hidup dan kehutanan dari gangguan dan ancaman;
- b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Terselenggaranya penanganan kasus dan/atau perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, berpelayanan prima dan akuntabel.

Program Prioritas Ditjen Gakkum LHK antara lain Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam mencapai Program Prioritas tersebut dapat digambarkan dari table di bawah ini:

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)
Program 029.WA : Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum
Kegiatan 5427 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program 029.FF : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
	Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman
Kegiatan 5428 : Pencegahan dan Pengamanan Hutan		
	Telaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

	Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar
Program 029.FD : Kualitas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan
	Terselesainya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
Kegiatan 5429 : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan
Kegiatan 5430 : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Kegiatan 5431 : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan

		P21/berkas perkara dinyatakan lengkap
	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya

Tabel 3. Matrik IKP – IKK Ditjen Gakkum LHK Dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024

Adapun kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam mendukung tercapainya Program Prioritas Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen PHLHK, output kegiatannya antara lain:
 - Layanan dukungan manajemen UPT
 - Layanan perkantoran
- b. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, output kegiatannya antara lain:
 - Jumlah operasi pengamanan hutan
 - Jumlah operasi peredaran hasil hutan
 - Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya
- c. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, output kegiatannya antara lain:
 - Pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi yang ditangani
 - Pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani
- d. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, output kegiatannya antara lain:
 - Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21
 - Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN (OUTPUT) UNIT KERJA ESELON II DAN UPT

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan salah satu UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kegiatan, sasaran kegiatan dan output kegiatannya mendukung secara langsung sasaran ataupun program prioritas kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam rangka mendukung kegiatan, sasaran kegiatan dan output kegiatan Unit Kerja Eselon II antara lain:

No	Kegiatan	Sasaran	Output
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)
			2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
2.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1. Telaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	1. Operasi Pengamanan Hutan
			2. Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
			3. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan
3.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	1. Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani

			2. Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani
4.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	1. Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap
		2. PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	1. Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya

Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

3.2. KOMPONEN KEGIATAN UNTUK MASING-MASING OUTPUT KEGIATAN UNIT KERJA ESELON II DAN UPT

Dari indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II Ditjen Gakkum, kemudian diturunkan ke dalam sub-output dan komponen kegiatan. Adapun komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut:

	Output Kegiatan	Komponen Kegiatan
1.	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Penyusunan Rencana Program, dan Penyusunan Rencana Anggaran 2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

		3. Pengelolaan Keuangan
		4. Pengelolaan Kepegawaian
3.	Operasi Pengamanan Hutan	1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan
		2. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
		3. Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum
		4. Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum
4.	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
		2. Operasi Pembalakan Liar
		3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
		4. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan
		5. Penguatan Sistem Intelijen
		6. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
5.	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK
6.	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani	1. Penanganan pengaduan perusahaan
		2. Penanganan pengaduan non perusahaan
		3. Pengawasan bidang lingkungan hutan dan kehutanan
7.	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	1. Penanganan pengaduan DAS Citarum
		2. Pengawasan izin usaha di DAS Citarum
8.	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan	1. Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK

	P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	2. Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK 3. Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana Badan Usaha di wilayah DAS Citarum 4. Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK Badan Usaha di Wilayah DAS Citarum
9.	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	1. Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan 2. Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK 3. Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK 4. Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK

Tabel 5. Output Kegiatan dan Komponen Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

3.3. PENGARUSUTAMAAN

A. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah blueprint yang dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Program ini sejatinya mencakup 17 (tujuh belas) tuju. Kontribusi Ditjen Gakkum LHK terhadap SDGs mencakup 6 (enam) tujuan yang mana dua diantaranya menjadi focus pengarusutamaan tersendiri. Keenam tujuan yang dikontribusikan yakni:

Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Penanganan Perubahan Iklim, serta Ekosistem Laut.

Tujuan berdirinya Ditjen Gakkum LHK dan organisasi satuan kerja di bawahnya adalah memastikan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan serta menegakan hukum di ranah lingkungan hidup dan kehutanan secara tegas dan adil. Dalam konteks SDGs, Ditjen Gakkum LHK memastikan ekosistem darat, air permukaan, dan laut teramankan dari kejahatan, gangguan dan ancaman. Demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Ditjen Gakkum LHK berfungsi sebagai instrumen pencegahan dengan mengupayakan peningkatan budaya taat perusahaan/ individu serta instrumen penegakan hukum dengan memastikan adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pada 21 Desember 2016, Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengendalian Perubahan Iklim telah ditandatangani oleh Kementerian LHK dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KNPPA). Komitmen Ditjen Gakkum LHK terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen

yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA) dan focal point di masing-masing organisasi yang tengah menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa roadmap PUG.

Dalam kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah memperhatikan kesetaraan gender diantaranya melalui:

- a. Mengikutsertakan Polhut laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pengamanan Kawasan hutan baik dalam bentuk operasi maupun pengumpulan data dan informasi.
 - b. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti latihan menembak.
 - c. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti diklat intelijen.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana di lapangan maupun di kantor sebagai upaya responsive gender.
 - e. Meminimalisir anggapan stereotype terhadap segala bentuk kegiatan/pekerjaan.
 - f. Menyediakan ruangan untuk laktasi untuk ibu menyusui.
- C. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Dari Ditjen Gakkum LHK, peningkatan modal sosial dan budaya ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima pengaduan dari masyarakat dari berbagai kanal pengaduan yg dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai kanal serta memfasilitasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan untuk mendapatkan haknya yang direnggut akibat tercemarnya dan rusaknya lingkungan oleh pelaku kejahatan LHK.

Pengarusutamaan modal sosial-budaya oleh Direktorat PPH salah satunya akan dilakukan melalui Operasi simpatik. Operasi simpatik merupakan salah satu upaya pemulihan keamanan Kawasan melalui pendekatan restorative justice. Model hukuman restorative melibatkan para pelaku, pengelola kawasan hutan (korban), pemerintah daerah dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat sekitar hutan yang telah menyadari melakukan pelanggaran peraturan perundangan dilakukan pembinaan secara intensif dan dilibatkan dalam pengamanan Kawasan hutan dalam rangka pemulihan keamanan hutan. Sedangkan para pelaku sebagai pemodal atau aktor intelektual dilakukan proses penegakan hukum.

D. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pementapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memulai perjalanan pemanfaatan transformasi digital dalam melakukan analisis mendalam, memperoleh data informasi, maupun proyeksi persebaran kejahatan di masa yang akan datang sejak tahun 2017 dengan penyediaan infrastruktur command center melalui pembangunan dan pengembangan Center of Intelligence. Memasuki tahun ketiga operasionalisasi, Center of Intelligence akan ditunjang dengan pengintegrasian data dan informasi sebagai optimalisasi sistem yang

digunakan dan akan terus dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui penyediaan data yang terintegrasi, komprehensif, dan terverifikasi serta mudah diakses oleh publik.

Selain pengintegrasian data, Ditjen Gakkum LHK juga tengah mengimplementasi sistem digitalisasi melalui Paperless Documentation System dengan pengaplikasian Electronic document and digital signing di seluruh badan Ditjen Gakkum LHK. Dengan demikian penelusuran dokumen serta pencegahan terjadinya pemalsuan dokumen sangat mudah dilakukan.

Dalam kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah memanfaatkan teknologi dan transformasi digital meliputi :

- a. Pemanfaatan teknologi digital forensic untuk ekstraksi data pada barang bukti elektronik;
- b. Pembangunan Sistem Pemantauan Kerawanan Keamanan Hutan (Spartan) untuk menyimpan dan mengolah data kerawanan hutan;
- c. Pengembangan Cyber patrol unit untuk mendokumentasikan hasil penelusuran perdagangan ilegal TSL secara daring; dan
- d. Pembangunan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan data citra satelit.

3.4. STRATEGI KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki beberapa strategi yang dapat menjadi potensi dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Identifikasi strategi kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dukungan pengelolaan sumber daya manusia diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Penanaman nilai-nilai dasar dalam setiap menjalankan tugas, yaitu integritas, profesional, peduli dan responsif.
- Pengadaan sarana-prasarana dan kondisi kerja yang memadai.
- Adanya pola karier dan kompensasi yang terarah dan sesuai.
- Pemberlakuan sistem reward & punishment bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugas.

Dengan dilakukannya strategi tersebut di atas maka diharapkan akan terbentuk Sumber Daya Manusia yang responsif, inovatif, profesional dan memiliki integritas.

2. Sistem Kelembagaan

Dukungan kelembagaan diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Bentuk dukungan kelembagaan tersebut antara lain:

- Penguatan dan komitmen dan dukungan dari Kementerian.
- Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, baik dari segi komitmen maupun dari segi sumber daya manusia penegak hukum.
- Penguatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis, baik dari segi komitmen maupun dari segi sumber daya manusia penegak hukum.

Dengan dilakukannya strategi tersebut di atas maka diharapkan terbentuk critical mass penegakan hukum dan terlaksana pemanfaatan sumber daya yang efektif.

3. Sistem Peradilan

Hal lain yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah peningkatan sistem peradilan dari segi sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas hakim, penuntut, kuasa hukum dan penyidik terkait kasus pidana LHK sehingga diharapkan akan terwujud putusan yang berkeadilan, berkualitas dan berefek jera.

4. Sistem Tata Kelola Governance

Selanjutnya adalah strategi kelembagaan dari sistem tata kelola pemerintahan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- Penguatan partisipasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
- Adanya transparansi sistem kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
- Adanya kepastian bahwa sistem kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- Penerapan manajemen risiko dari setiap kegiatan yang dijalankan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Dengan dilakukannya strategi tersebut di atas, maka diharapkan akan terbentuk dukungan publik, dukungan politik dan dukungan lembaga lain terkait dengan penegakan hukum bidang LHK serta kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang bebas masalah hukum.

5. Sistem Dukungan Pengambilan Putusan

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sistem dukungan pengambilan keputusan, melalui kegiatan-kegiatan yaitu penerapan database (big data system dan artificial intelligence), forensik, dukungan teknologi dan dukungan ahli sehingga diharapkan akan terwujud putusan yang cepat, tepat dan berbasis ilmiah.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. PETA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN UNIT KERJA ESELON II DAN UPT

Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara digambarkan dengan table dibawah ini :

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Satuan Target
Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	Point	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Layanan	Gaji dan Tunjangan	
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	Penyusunan Rencana Program, dan Penyusunan Rencana Anggaran	
				Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	
				Pengelolaan Keuangan	
				Pengelolaan Kepegawaian	

Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	Operasi Pengamanan Hutan	Operasi	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	Laporan
				Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi
				Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum	Operasi
				Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum	Laporan
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Laporan
				Operasi Pembalakan Liar	Operasi
				Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi
				Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	Laporan
				Penguatan Sistem Intelijen	Laporan

				Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Laporan
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Orang	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	Orang
Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Persentase	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani	Perusahaan	Penanganan pengaduan perusahaan	Perusahaan
				Penanganan pengaduan non perusahaan	Pengaduan
				Pengawasan bidang lingkungan hutan dan kehutanan	Perusahaan
		Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	Perusahaan	Penanganan pengaduan DAS Citarum	Perusahaan
				Pengawasan izin usaha di DAS Citarum	Perusahaan
Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup	Kasus	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai	Kasus	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	Kasus
				Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Kasus

dan kehutanan yang ditangani		dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap		Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana Badan Usaha di wilayah DAS Citarum	Kasus
				Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK Badan Usaha di Wilayah DAS Citarum	Kasus
	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus
				Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK	Orang
				Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	Lokasi
				Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	Kasus

Tabel 6. Pohon kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja yang direncanakan untuk kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Target Rencana Strategis				
			2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen Gakkum	Layanan dukungan manajemen UPT	Layanan	1	1	1	1	1
	Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan	Operasi	11	7	4	18	20
	Jumlah operasi peredaran hasil hutan	Operasi	12	5	4	71	75
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	60	40	112	116

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Target Rencana Strategis				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi yang ditangani	Perusahaan	93	88	127	331	357
	Pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	Perusahaan	20	0	0	87	92
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus	12	28	24	49	59
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya*	Orang	3	4	4	8	8

Tabel 7. Target Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Untuk Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 2020-2024, berdasarkan target kinerja di atas maka disusun kerangka pendanaan kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Target Rencana Strategis					Anggaran (dalam ribu rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis	Layanan dukungan manajemen UPT	Layanan	1	1	1	1	1	1.271.527	1.000.000	1.000.000	1.730.000	1.820.000
Ditjen Gakkum	Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	24.337.900	24.697.900	26.173.274	23.978.000	24.240.000
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan	Operasi	11	7	4	18	20	3.948.600	2.216.660	2.504.724	25.058.000	25.749.000

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Target Rencana Strategis					Anggaran (dalam ribu rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah operasi peredaran hasil hutan	Operasi	12	5	4	71	75	4.911.370	1.812.608	2.335.276	36.613.000	42.766.000
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	60	40	112	116	0	300.667	240.000	400.000	400.000
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi yang ditangani	Perusahaan	93	88	127	331	357	3.656.955	1.947.280	3.145.500	22.354.618	25.623.628
	Pengaduan, pengawasan, dan sanksi	Perusahaan	20	0	0	87	92	137.000	0	0	1.310.436	1.500.319

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Target Rencana Strategis					Anggaran (dalam ribu rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani											
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus	12	28	24	49	59	5.078.764	3.225.749	11.490.000	20.499.000	26.721.800
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya*	Orang	3	4	4	8	8	100.073	286.306	20.000	1.308.447	1.705.647

Tabel 8. Kerangka Pendanaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 berfungsi juga sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja pembangunan seluruh jajaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya.

Beberapa hal strategis yang akan menjadi perhatian Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam lima tahun kedepan antara lain :

1. Kelembagaan
 - a. Sumber Daya Manusia
 - Polisi Kehutanan (POLHUT)

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam rangka untuk pemenuhan ataupun penambahan personil akan mengajukan formasi ke Eselon I. Meningkatkan keterampilan dan kualitas Polhut melalui mengikut sertakan kegiatan Diklat ataupun studi banding. Menyusun analisis kebutuhan personil untuk kegiatan pengamanan mengingat lingkup kerja yang sangat besar dengan tipologi permasalahan yang berbeda-beda.

- Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

Dalam rangka pemenuhan personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara akan mengajukan formasi ke Eselon I mengingat lingkup jumlah perusahaan yang banyak dan keterbatasan jumlah personil. Meningkatkan keterampilan dan kualitas PPLH melalui mengikut sertakan kegiatan Diklat ataupun studi banding.

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara akan mengusulkan personil untuk didiklatkan menjadi PPNS ke Direktorat Penegakan Hukum Pidana atau mengadakan diklat PPNS dengan anggaran DIPA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

- Staf Administrasi

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas kinerja staf administrasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara akan aktif mengikut sertakan dalam kegiatan Diklat dan studi banding. Serta mengusulkan penambahan jumlah staf administrasi kepada eselon I, mengingat kurangnya jumlah personil staf administrasi.

b. Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

sampai ke tingkat POS akan terus dilakukan selama 5 tahun kedepan melalui pengadaan baru dan pemeliharaan agar memenuhi standar dan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan secara optimal. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi standarisasi peralatan, distribusi dan pemantauan penggunaan akan terus ditingkatkan untuk menjamin sarana prasarana personil dan organisasi terpenuhi dengan baik, dalam keadaan siap pakai dan dapat digunakan secara optimal.

2. Kerjasama

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara kerjasama dengan para stakeholders akan tetap menjadi prioritas untuk mengatasi lingkup wilayah kerja yang luas dan permasalahan yang kompleks.

3. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi sangat diperlukan dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaksanaan kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Pemanfaatan teknologi akan terus dikembangkan melalui penyediaan perangkat, peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi operasional *Center of Intelligence*.

Komponen kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam rangka mendukung program Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama lima tahun antara lain :

1. Gaji dan tunjangan
2. Operasional dan pemeliharaan kantor
3. Penyusunan rencana program, dan penyusunan rencana anggaran
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
5. Pengelolaan keuangan
6. Pengelolaan kepegawaian
7. Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan Kawasan hutan
8. Operasi pengamanan Kawasan hutan

9. Operasi pengamanan Kawasan hutan di DAS Citarum
10. Sosialisasi pengamanan DAS Citarum
11. Pengumpulan data dan informasi peredaran hasil hutan illegal
12. Operasi pembalakan liar
13. Sosialisasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan
14. Penguatan sistem intelijen
15. Dukungan teknis pencegahan dan pengamanan hutan
16. Peningkatan kapasitas polisi kehutanan LHK
17. Penanganan pengaduan perusahaan
18. Penanganan pengaduan non perusahaan
19. Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
20. Penanganan pengaduan DAS Citarum
21. Pengawasan izin usaha di DAS Citarum
22. Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana LHK
23. Penyidikan kasus tindak pidana LHK
24. Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana badan usaha di wilayah DAS Citarum
25. Penyidikan kasus tindak pidana LHK badan usaha di wilayah DAS Citarum
26. Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK
27. Peningkatan kapasitas PPNS bidang LHK
28. Dukungan teknis penegakan hukum pidana LHK
29. Pra Peradilan kasus tindak pidana LHK

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, kiranya seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang diamanatkan kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diwujudkan selama periode Tahun 2020-2024, semoga mampu dipenuhi dengan baik dan senantiasa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Program/ Kegiatan/	SasaranStrategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
	Sasaran Strategis 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.													
	- <i>IKU 14. Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum</i>													
Program 029.WA	Dukungan Manajemen							24.400	24.960	25.420	25.708	26.060	Eselon 1	
	Sasaran Program : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Responsive dan Berpelayanan Prima													
	- <i>IKP : Nilai SAKIP Ditjen Gakkum</i>													
Kegiatan 5427	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan							24.400	24.960	25.420	25.708	26.060	Eselon 2	
	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Dukungan Manajemen yang Prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.													
	- <i>IKK 1 : Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan</i>													
	- <i>IKK 2 : Level Maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>													
	- <i>IKK 3 : Laporan Keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>													
	- Output 1 : Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Layanan	1	1	1	1	1	1.400	1.500	1.600	1.730	1.820	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 1 : Gaji dan Tunjangan												BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 2 : Operasional dan Pemeliharaan Kantor												BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	- Output 2 : Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	23.000	23.460	23.820	23.978	24.240	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 1 : Penyusunan Rencana Program, dan Penyusunan Rencana Anggaran												BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 2 : Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi												BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 3 : Pengelolaan Keuangan												BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 4 : Pengelolaan Kepegawaian												BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Program 029.FF	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								19.209	36.451	46.407	62.071	68.915	Eselon 1	
	Sasaran Program : Teramankannya Hutan dari Gangguan dan Ancaman														
	- IKP : Jumlah Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman														
Kegiatan 5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan								19.209	36.451	46.407	62.071	68.915	Eselon 2	
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal														
	- IKK 1 : Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan														
	- IKK 2 : Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar														
	- Output 1 : Operasi Pengamanan Hutan	Operasi	11	14	16	18	20	6.955	15.203	19.553	25.058	25.749	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 1 : Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	Laporan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 2 : Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 3 : Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum	Operasi											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 4 : Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum	Laporan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	- Output 2 : Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	21	47	56	71	75	12.254	20.948	26.504	36.613	42.766	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 1 : Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Laporan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 2 : Operasi Pembalakan Liar	Operasi											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 3 : Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 4 : Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Laporan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 5 : Penguatan Sistem Intelijen	Laporan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 6 : Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Laporan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	- Output 3 : Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Orang	0	105	109	112	116	0	300	350	400	400	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 1 : Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	Orang											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
Program 029.FD	Kualitas Lingkungan Hidup								16.352	30.430	37.204	45.472	55.552	Eselon 1	
	Sasaran Program 1 : Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha / Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan														
	- IKP : Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan														

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

	Sasaran Program 2 : Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
	- <i>IKP : Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani</i>														
Kegiatan 5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi							8.992	16.043	19.647	23.665	27.124	Eselon 2		
	Sasaran Kegiatan 1 : Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Bidang LHK														
	- <i>IKK 1 : Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Bidang LHK</i>														
	Sasaran Kegiatan 2 : PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
	- <i>IKK 1 : Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>														
	- Output 1 : Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang Ditangani	Perusahaan	170	225	288	331	357	8.492	15.156	18.558	22.355	25.624	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 1 : Penanganan Pengaduan Perusahaan	Perusahaan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 2 : Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Pengaduan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 3 : Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	- Output 2 : <i>Pengaduan</i> , Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Terkait DAS Citarum yang Ditangani	Perusahaan	40	66	76	87	92	500	887	1.089	1.310	1.500	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 1 : Penanganan Pengaduan DAS Citarum	Perusahaan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 2 : Pengawasan Izin Usaha di DAS Citarum	Perusahaan											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
Kegiatan 5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan							7.360	14.387	17.557	21.807	28.428	Eselon 2		
	Sasaran Kegiatan 1 : Kasus Tindak Pidana LHK yang Diselesaikan Sampai Dengan P21														
	- <i>IKK 1 : Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan Sampai Dengan P21/Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap</i>														
	- Output 1 : Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan Sampai Dengan P21/Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap	Kasus	24	38	44	49	59	6.918	13.524	16.504	20.499	26.722	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 1 : Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	Kasus											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 2 : Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Kasus											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 3 : Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana Badan Usaha di Wilayah DAS Citarum	Kasus											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	• Komponen 4 : Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK Badan Usaha di Wilayah DAS Citarum	Kasus											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra	
	Sasaran Kegiatan 2 : PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
	- <i>IKK 1 : Jumlah PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>														

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

-	Output 1 : Jumlah PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	4	5	5	8	8	442	863	1.053	1.308	1.706	BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 1 : Fasilitasi Penanganan Kasus tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 2 : Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK	Orang											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 3 : Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	Lokasi											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra
	• Komponen 4 : Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	Kasus											BPPHLHK Jabalnusra	Jabalnusra

Tabel 9. Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara